



LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM BANYUWANGI HIJAU

PERIODE: Maret-April 2022

PENGANTAR

Program Banyuwangi Hijau (BWH) adalah inisiatif pengembangan pengelolaan sampah berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menggabungkan model pengelolaan sampah perkotaan dalam pengelolaan sampah sirkular dengan menyediakan solusi daur ulang yang dapat meningkatkan nilai ekonomi sampah. BWH mendorong keterlibatan multi-pihak untuk meningkatkan penyediaan layanan persampahan yang terintegrasi didukung partisipasi aktif masyarakat. Hal ini diharapkan mendorong pemulihan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, sebagaimana misi Program Banyuwangi Rebound.

Secara umum, tujuan BWH adalah meningkatkan cakupan layanan persampahan yang berkelanjutan, dan memenuhi prinsip *cost recovery*, serta berkontribusi terhadap penurunan prevalensi *stunting*, melalui kemitraan multi-pihak. Dimana hal ini bisa dicapai dengan lima tujuan program, yakni:

- Memperkuat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah dan mengembangkannya menjadi UPTD – Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Persampahan.
- Mendorong praktik perilaku pengelolaan sampah berkelanjutan pada masyarakat.
- Mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang memberikan keuntungan ekonomi.
- Mengembangkan lingkungan yang mendukung bagi keterlibatan swasta dalam investasi dan pengoperasian sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
- Menguji coba skema inovasi pendanaan untuk persampahan.

BWH diselenggarakan pada periode 2022-2024 dengan menerapkan integrasi komponen program yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target JAKSTRANAS Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tahun 2025, yakni peningkatan penanganan sampah hingga 70% dan pengurangan timbulan sampah hingga 30%. Komponen program adalah Tata Kelola dan Kelembagaan, Sistem Operasional Persampahan, Komunikasi Perubahan Perilaku, dan Inovasi Pendanaan.

1

MANAJEMEN PROGRAM

Pasca peluncuran program pada 21 Februari 2022, tim BWH menyelenggarakan kegiatan persiapan sesuai dengan rencana kerja program. Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan pemangku kepentingan lainnya, setiap komponen program bekerja untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan tercapai pada periode Maret-April 2022. Pelibatan para pimpinan instansi pemerintah daerah terus dilakukan dan diperkuat untuk meningkatkan perannya dalam pelaksanaan program.

Pada 19 Maret 2022, DLH didukung oleh tim BWH mempersiapkan dan melaksanakan kunjungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Panjaitan ke TPS3R Bio Mandiri Lestari, Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar. Saat kunjungan, Bapak Menko Luhut beserta jajarannya memperoleh informasi tentang (1) keberhasilan sistem persampahan berbasis masyarakat yang didukung oleh STOP Muncar, (2) Program BWH dan misinya untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, termasuk percontohan inovasi pendanaan bagi Pemerintah Banyuwangi. "Program (TPS3R) ini harus dikembangkan di berbagai daerah. Dengan modal yang murah fasilitas ini bisa berdampak luar biasa terhadap kebersihan lingkungan," ujar Bapak Menko Luhut dalam keterangannya kepada pers.

Komposisi tim BWH tidak berubah dari periode pelaporan yang lalu dan telah membuat kemajuan yang cukup baik di setiap komponen sesuai rencana. Tim BWH telah memulai diskusi dengan Pokja PKP menyelesaikan proses Detailed Engineering Design, memulai studi desain formatif untuk perubahan perilaku masyarakat, dan mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan dalam skema *plastic credit*.



Bjørnar Dahl Hotvedt, Minister Counsellor Kedutaan Besar Norwegia di TPS3R Bio Mandiri Lestari pada 5 Maret 2022.

1.1 Keluaran Program BWH

Kegiatan Program BWH dikategorikan berdasarkan empat komponen program. Pada Maret-April, tim terus berkomunikasi dengan sektor pemerintah terkait dan para pemangku kepentingan sehingga perumusan rancangan program dan kegiatan yang akan diupayakan bersama bisa lancar. Berikut adalah hasil kegiatan BWH selama periode pelaporan ini:

- Rapat koordinasi pertama dengan seluruh anggota Pokja Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dilakukan pada awal Maret. Dipimpin oleh Kabid Sarana Prasarana, Bappeda, forum menyepakati dukungan yang diperlukan untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan berikut tindaklanjutnya. Pada periode ini, diskusi tentang peningkatan kapasitas UPTD dari level B ke A dan menyepakati langkah-langkah penyusunan model keuangan BLUD juga dilakukan oleh DLH dan tim BWH.
- Pengembangan DED berhasil diselesaikan pada akhir April. DLH berperan aktif dalam pengembangan desain, terutama pada kesesuaian desain dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Banyuwangi. Pada saat yang sama, mengacu pada dokumen DED, tim BWH juga mengembangkan TOR pembangunan TPS untuk pengadaan jasa konstruksi yang dijadwalkan akan dimulai pada minggu 2 Mei. Draf modul pengelolaan sampah untuk platform sekolah dikembangkan dan didiskusikan dengan STIKES untuk diadopsi lebih lanjut untuk implementasi.
- Direkrutnya konsultan pengembangan pedoman Studi Formatif dan panduan Pilar 4 STBM, dan dilakukan diskusi awal dengan konsultan terkait dan Dinas Kesehatan. Rancangan strategi KPP dan rencana implementasi dikembangkan dan dikonsultasikan secara internal sebelum dibicarakan dengan Dinas Kesehatan. Perencanaan kegiatan advokasi media dilakukan bersamaan dengan rancangan kegiatan KPP.
- Sosialisasi *plastic credit* kepada pemerintah Banyuwangi (Bappeda, Bapenda, BPKAD, DLH, PUCKPP, Bagian Hukum Sekda) menghasilkan dukungan positif dan tindak lanjut untuk memastikan inisiatif tersebut dilaksanakan. Sementara tim BWH melanjutkan proses registrasi Project STOP merujuk pada standar *Plastic Credit Verra* untuk menerbitkan dan menjual *plastic credit* yang akan memberi manfaat bagi operator sampah.

Plastic credit adalah instrumen keuangan inovatif yang dapat mendatangkan investasi bagi sistem persampahan. Merupakan unit yang dapat diukur, diverifikasi, dan dapat ditransfer yang mewakili jumlah tertentu dari plastik yang telah dikumpulkan dari lingkungan, atau didaur ulang.

Satu poin *plastic credit* sama dengan satu ton sampah plastik yang dicegah masuk ke lingkungan, baik melalui pengumpulan maupun daur ulang.



1.2 Komunikasi

Selain mempromosikan BWH, unit Komunikasi juga mendukung aspek advokasi program melalui kegiatan advokasi media, yang akan disampaikan berkoordinasi dengan Komponen KPP dan Tata Kelola & Kelembagaan. Berikut gambaran hasil kegiatan periode Maret – April 2022:

- *Minister Counsellor*, Kedutaan Besar Norwegia di Jakarta, Bjørnar Dahl Hotvedt melakukan kunjungan ke Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS3R) Bio Mandiri Lestari di Desa Tembokrejo, Muncar pada tanggal 5 Maret 2022. Bjørnar melihat operasional dan pengolahan sampah terpadu dan berbagi pengembangan lebih lanjut program pengelolaan sampah di Banyuwangi melalui BWH kepada Bupati Banyuwangi. Kunjungan tersebut diliput oleh sembilan media lokal.
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhur Binsar Pandjaitan mengunjungi TPS3R Bio Mandiri Lestari pada 19 Maret 2022 untuk melihat keberhasilan pengolahan sampah terpadu tersebut dan pembelajaran yang menginspirasi desain Program BWH. BWH juga menampilkan inovasi pendanaan dalam mendorong ekonomi sirkular di Banyuwangi. Kunjungan ini juga dihadiri Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kemenko Marves, Bupati Banyuwangi, dan PLT Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi, termasuk perangkat desa dan kecamatan di Muncar. Ada 35 pemberitaan media, baik di media lokal maupun nasional.

2

KEGIATAN KOMPONEN PROGRAM

2.1. Komponen Tata Kelola dan Kelembagaan

Pada periode Maret-April, bersama dengan sektor pemerintah terkait, komponen ini mengembangkan serangkaian peraturan yang terdiri dari:

1. Revisi peraturan bupati tentang peningkatan kapasitas UPTD dari b menjadi a, yang akan menjadi dasar hukum peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, juga sebagai langkah menyiapkan model keuangan BLUD. Revisi ditargetkan selesai pada triwulan ketiga 2022.
2. Aktivasi Pokja PKP untuk mencakup lintas kegiatan di setiap instansi dan pemangku kepentingan yang terkait dengan BWH. Diantaranya revisi SK Bupati 2020 tentang Pokja dan penataan kembali fungsi organisasi Pokja.
3. Melanjutkan proses penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kabupaten Banyuwangi dengan BWH yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 April 2022.
4. Advokasi pemerintah kabupaten untuk mengembangkan peraturan bupati untuk implementasi teknis sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga terus dilakukan. Regulasi tersebut akan diajukan pada pertengahan kuartal ketiga. Pemerintah kabupaten dan BWH melanjutkan komunikasi dengan pemerintah provinsi sehingga terbit rekomendasi atas perda tersebut untuk pengesahan pengelolaan sampah rumah tangga.

2.2. Komponen Sistem Operasional Sampah

Pada Maret-April ini, kegiatan komponen fokus pada Sub Komponen Pengoperasian Persampahan, dimana dilakukan berbagai persiapan untuk sarana, prasarana, dan pengoperasian sistem persampahan dalam Program BWH. Sementara kegiatan Sub Komponen Pengumpulan Sampah bersama DLH akan fokus pada persiapan dan penyelenggaraan studi observasi lokasi pelayanan sampah di 33 desa lokasi BWH.

Dalam rangka perancangan fasilitas pemrosesan sampah, penyusunan DED (Detail Design Engineering) berhasil diselesaikan pada akhir April. Selama proses penyusunannya, DLH dan Dinas terkait lainnya berperan aktif memberikan masukan agar fasilitas terbangun nantinya memenuhi standar dan mampu mengelola sampah sesuai target layanan. DLH dan dinas terkait lainnya menyepakati DED sebagai dasar dalam pembangunan fasilitas pengolahan sampah.



Kunjungan tim BWH dan Kepala Dinas Lingkungan hidup beserta staff untuk menyepakati penyiapan lahan bagi instalasi sistem persampahan.

Sejumlah poin penting yang menjadi perhatian pemda disepakati untuk diakomodasi dalam dokumen DED. Seperti fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah air limbah domestik karyawan TPS3R dan air lindi dari proses komposting, area terbuka hijau, penyediaan air bersih, dan fasilitas pendukung kesehatan.

Selanjutnya dokumen ini akan menjadi dasar dan salah satu persyaratan pengajuan perijinan seperti Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL), Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) dan perijinan lain untuk pembangunan TPS.

Pada saat yang sama, mengacu pada dokumen DED, tim BWH juga sedang menyusun TOR pengadaan jasa konstruksi, konveyor pemilahan, armada pengangkutan sampah, dan tempat sampah. Seluruh proses pengadaan akan mulai dilaksanakan di awal Mei 2022.

Selama bulan Maret-April, BWH melakukan kajian untuk jenis kendaraan pengangkut sampah yang akan digunakan untuk operasional pengangkutan residu dari TPS ke TPA. Kajian ini mencakup aspek teknis, operasional dan pemeliharaan, keamanan, serta keuangan. Jenis angkutan sampah yang dikaji adalah:

- Truk Arm-roll
- Dump truck
- Truk compactor

Kajian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa kendaraan yang paling efektif dan efisien untuk mengangkut sampah dari TPST ke TPA adalah truk arm-roll terutama karena biaya investasi dan operasionalnya paling efisien serta teknis pengoperasian dan perawatannya relative paling mudah.

Komponen Sistem Operasional Sampah juga membantu menyusun materi Pengelolaan Sampah di Sekolah untuk mendukung terselenggaranya kegiatan Sekolah Sehat yang dikelola oleh Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang diselenggarakan oleh Komponen KPP untuk mendukung STIKES menyelenggarakan kegiatan ini. Materi ini digunakan sebagai acuan program pelatihan pelaksanaan edukasi pengelolaan sampah di sekolah, yang meliputi pengertian dan jenis sampah, tata cara pengelolaan sampah, mobilisasi sumber daya sekolah, dan penyusunan rencana kerja pengelolaan sampah di sekolah.

2.3. Komponen Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP)

Pada periode pelaporan ini, Komponen KPP fokus pada pelaksanaan studi formatif pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, memulai pengembangan pedoman Pilar 4 STBM, dan mulai merancang strategi KPP sekaligus mengelola mobilisasi mitra potensial untuk berkontribusi pada target KPP. Rincian pencapaiannya adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan TOR Studi Formatif dan merekrut peneliti yang akan mengembangkan desain dan melaksanakannya. Desain dikonsultasikan kepada Kabid. Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan Kepala UPTD Dinas Lingkungan Hidup. Disepakati bahwa penelitian akan dimulai pada minggu ke-2 Mei 2022, menerapkan metode FGD, IDI, dan survei menyasar responden di lokasi program BWH. Temuan utama studi akan dipresentasikan pada akhir Juni 2022.
2. Pada akhir April 2022, direkrut konsultan untuk mendukung pengembangan Pedoman Pilar 4 STBM Dinas Kesehatan Banyuwangi selama April-Juli 2022. Ini akan digunakan sebagai dasar untuk menggelar kegiatan pemucuan di lokasi BWH, sebagai upaya perubahan perilaku dalam mengelola sampah di rumah tangga.
3. Komponen ini menginisiasi komunikasi dengan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung upaya perubahan perilaku dalam penanganan sampah di Banyuwangi. Kesepakatan awal dicapai dengan STIKES (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banyuwangi), PKK, Pesantren Darussalam, dan SIKIA (UNAIR).
4. Dokumen rancangan strategi dan rencana implementasi kampanye komunikasi perubahan perilaku dikembangkan dan akan disempurnakan setelah hasil studi formatif tersedia dan konsultasi dengan Dinas Kesehatan dan para pihak terkait.
5. Merencanakan kegiatan advokasi media untuk mendukung kerja advokasi BWH secara keseluruhan dan pada saat yang sama berkontribusi pada upaya perubahan perilaku.

2.4. Komponen Inovasi Pendanaan

Komponen Inovasi Pendanaan memiliki dua sub komponen: (1) Eco-sirkular, yang merupakan pengembangan usaha perdagangan sampah untuk berkontribusi pada aliran pendapatan yang stabil untuk pendanaan operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan (2) Inovasi Pendanaan, yang bertujuan untuk membuat percontohan opsi mekanisme pendanaan untuk menyeimbangkan investasi belanja modal bagi infrastruktur pengelolaan sampah. Berikut berbagai kegiatan yang diselenggarakan:

2.4.1 Eco-Sirkular (STOP Aggregator)

- Bersama Borealis (mitra strategis BWH) mempelajari aspek hukum tentang pendirian badan hukum Eco-Sirkular.
- Pemodelan keuangan berkelanjutan dan pelatihan perencanaan bisnis untuk Eco-Sirkular.
- Diskusi kemitraan dengan para pengambil sampah daur ulang internasional potensial untuk mendapatkan kontrak pengambilan sampah jangka panjang.

2.4.2 Inovasi Pendanaan

- Menyelesaikan sosialisasi Proses Pendaftaran *Plastic Credit* kepada para pemangku kepentingan di Kabupaten Banyuwangi, Pasuruan, dan Jember. Pemangku kepentingan yang terlibat antara lain perwakilan resmi dari DLH, Dinas Kabupaten, Bappeda, DPMD, dan pemerintah desa. Semua pemangku kepentingan yang terlibat telah memufakati bahwa SYSTEMIQ mendaftarkan Proyek STOP sesuai Standar *Plastic Credit* Verra untuk menerbitkan dan menjual *plastic credit* yang akan memberikan manfaat bagi operator persampahan.
- Mempersiapkan dokumen proyek dan laporan pemantauan berikut meninjau perjanjian kerjasama yang diperlukan untuk pendaftaran proyek oleh pemangku kepentingan utama (contohnya: operator sampah, DLH, SEKDA) di masing-masing kota.
- Melakukan peninjauan awal terhadap metodologi *carbon credit* yang sudah ada dan lanskap peraturan nasional berikut persiapan awal untuk dokumentasi proyek terkait *carbon credit* bagi pengelolaan pengomposan organik STOP Jember.
- Kemitraan dengan Universitas Michigan untuk melakukan studi kelayakan terkait inovasi pendanaan sebagai bahan merancang skema inovasi pendanaan untuk menarik modal yang sebelumnya tidak dapat diakses untuk mendanai proyek-proyek baru terkait pengumpulan dan pemilahan sampah di Indonesia.

TANTANGAN & REKOMENDASI

Tantangan

- Tidak konsistennya definisi TPS yang ditemukan dalam beberapa peraturan daerah menyebabkan komplikasi pada koordinasi dan komunikasi, yang berkontribusi pada kelancaran proses perizinan.
- Masih kurangnya integrasi antara tiga aspek pengelolaan sampah berkelanjutan, yakni (1) upaya penciptaan permintaan masyarakat atas layanan persampahan (*demand*), (2) ketersediaan layanan (*supply*), dan (3) dukungan kebijakan/peraturan dan sosial untuk terselenggaranya layanan persampahan (*enabling environment*).
- Penyelenggaraan kegiatan advokasi media akan mendorong tim DLH dan BWH menjadi perhatian publik yang lebih luas.

Rekomendasi

- Menyelaraskan definisi TPS antara DLH dan instansi pemerintah terkait, yang kemudian bisa menjadi bahan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk meninjau definisi TPS dan memutuskan secara formal definisi yang akan digunakan.
- Melakukan komunikasi dan koordinasi rutin antara tim BWH dan instansi pemerintah terkait melalui Pokja PKP agar dukungan dan kontribusi terhadap sistem persampahan oleh berbagai sektor, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya bisa terkoordinasi dengan baik.
- Melakukan persiapan bersama dengan DLH untuk menyepakati jalur komunikasi dengan publik berikut rencana pelaksanaannya sebelum kegiatan advokasi media dimulai.

AGENDA KEGIATAN MEI - JUNI 2022

Berikut rencana kegiatan Program Banyuwangi Hijau periode Mei - Juni 2022:

- Melanjutkan upaya penguatan Pokja PKP sebagai platform koordinasi lintas instansi dan pemangku kepentingan utama, berupa fasilitasi serangkaian pertemuan menyusun rencana kerja dan menyelesaikan revisi keputusan bupati tentang pengelolaan sampah rumah tangga.
- Menyelesaikan rancangan peraturan bupati untuk pengelolaan sampah rumah tangga dengan Bagian Hukum Sekda dan DLH.
- Menyelenggarakan pelatihan bagi pimpinan UPTD Persampahan tentang pengembangan standar pelayanan minimal sebagaimana diamanatkan Kementerian Dalam Negeri.
- Menyelesaikan pengembangan dokumen DED serta menyelenggarakan proses pengadaan pembangunan TPS berikut sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan sampah. Koordinasi dengan DLH dan sektor pemerintahan terkait tentang perijinan dan persyaratannya agar konstruksi TPS bisa dimulai sesuai jadwal, yakni Juli 2022.
- Melaksanakan studi observasi tentang wilayah program yang akan menerima pelayanan sampah untuk memastikan rancangan pengumpulan sampah sesuai dengan kondisi riil.
- Menyelenggarakan studi formatif perilaku pengelolaan sampah rumah tangga dan kegiatan *bootcamp* media yang menargetkan media lokal, *influencer*, dan komunitas pemuda di Banyuwangi untuk memperkenalkan BWH dan mengembangkan rencana kampanye kolaboratif.
- Menyusun dan menyelesaikan draf pertama pedoman pelatihan STBM Pilar 4, termasuk uji cobanya yang akan dilakukan di Banyuwangi.
- Menindaklanjuti pembahasan kegiatan para mitra pendukung program untuk dirumuskan lebih lanjut dengan melibatkan komponen-komponen BWH.
- Terkait Eco-Sirkular, tim BWH akan menyelesaikan tinjauan hukum tentang pendirian badan hukum Eco-Sirkular, mempersiapkan program percontohan dengan mitra daur ulang terpilih di Surabaya. Menyampaikan hasil penelitian tentang lanskap pasokan sampah di Banyuwangi berikut rekomendasinya, serta mempersiapkan bahan pengembangan kapasitas bagi mitra pemasok sampah potensial.
- Kegiatan *plastic credit* akan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan semua kota lokasi Proyek STOP, finalisasi dokumen dan pemantauan proyek dan mendaftarkan proyek dengan registri Verra. Melakukan pertemuan awal dengan pemangku kepentingan membahas verifikasi dan validasi proyek bekerja sama dengan auditor pihak ketiga (misalnya: Badan Validasi dan Verifikasi/VVB). Melanjutkan inisiatif pemasaran *plastic credit* yang sudah ada serta merancang dokumen proyek untuk *carbon credit*.
- Menyelesaikan studi kelayakan untuk inovasi pendanaan dengan University of Michigan.